

PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, AKTIVITAS KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

Tan, Novita Angelina
Anis Chariri¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of corporate governance on financial statements. The corporate governance variables used are the proportion of independent commissioners (COMINDEP), audit committee activity (ACMEET), managerial ownership (OSHIP) with profitability and leverage as control variables. The population of this study are non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009 – 2020. The total sample used in this study is 50 companies consisting of 25 companies categorized as companies that report financial statements based on the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) report. and 25 companies that do not report financial statements as comparisons selected based on industry and total assets. The data analysis used was descriptive statistical analysis, multicollinearity test, and hypothesis testing through logistic regression using SPSS 26 software. The results of this study indicate that the proportion of independent commissioners (COMINDEP) has a negative and significant effect on financial statements. Meanwhile, audit committee activity (ACMEET) and managerial ownership (OSHIP) have no significant effect on financial statement reporting.

Keywords: financial statement fraud, proportion of independent commissioners, audit committee activity, and managerial ownership.

PENDAHULUAN

Perusahaan ketika melakukan kegiatannya dituntut membuat laporan keuangan. Laporan keuangan memuat rangkuman transaksi ekonomi perusahaan dalam suatu periode pada tahun yang bersangkutan (Baridwan, 2004). Ikatan Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2019, menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan maksud menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan yang dimaksud, mencakup kreditor, regulator, investor, serta pihak lainnya yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan harus dipertimbangkan oleh pemilik dan pemegang saham ketika hendak mengambil keputusan sehingga perusahaan harus menyajikan informasi yang benar dan bebas dari kesalahan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (kecurangan), ataupun kesalahan yang tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan (kelalaian) (Hidayanti & Sunyoto, 2012). Namun, perusahaan pada dasarnya menghendaki agar laporan keuangan perusahaan dinilai baik oleh pemilik dan pemegang saham sehingga seringkali perusahaan melakukan kecurangan terhadap laporan keuangannya. Kecurangan laporan keuangan tersebut akan mengakibatkan para pengguna laporan keuangan mengambil keputusan yang tidak tepat dan mengalami kerugian apabila mengandalkan informasi tersebut.

Fenomena kecurangan laporan keuangan menarik untuk diteliti. Dalam pemberitaan di media massa seringkali diberitakan perusahaan – perusahaan besar yang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangannya, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kecurangan laporan keuangan juga menarik untuk diteliti karena kecurangan laporan keuangan pada perusahaan dapat

¹ Corresponding author

menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang mengandalkan laporan keuangan itu. Kecurangan laporan keuangan akan menghasilkan informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan para penggunanya memutuskan sesuatu yang salah (Tiapandewi et al., 2020). Meningkatnya kasus mengenai kecurangan laporan keuangan mengakibatkan meningkatnya perhatian pada reformasi tata kelola perusahaan sebagai suatu upaya pencegahan kecurangan terhadap laporan keuangan (Uzun et al., 2004). Tata kelola perusahaan merupakan struktur pada perusahaan yang bertujuan memaksimalkan nilai pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan atas perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat digunakan dalam rangka mencegah timbulnya kecurangan laporan keuangan (Sunaryo et al., 2019). Tata kelola perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu tata kelola internal dan eksternal (Barnhart & Rosenstein, 1998). Tata kelola internal berfokus pada faktor yang ada di dalam perusahaan sedangkan tata kelola eksternal berfokus pada faktor di luar perusahaan. Karakteristik dewan, komite audit, dan struktur kepemilikan dapat digunakan untuk memproksikan tata kelola (Chen et al., 2006).

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membahas hubungan antara tata kelola perusahaan dan kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian – penelitian tersebut menunjukkan hasil yang kontradiktif dan tidak konsisten antara satu sama lain sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh tata kelola internal perusahaan yang ditunjukkan oleh proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian terhadap tata kelola internal perusahaan ini dilakukan karena beberapa penelitian sebelumnya yang menguji tata kelola eksternal tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan menggabungkan variabel tata kelola internal dan eksternal secara bersama – sama sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas bagaimana pengaruh variabel tata kelola internal terhadap kecurangan laporan keuangan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Konsep yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan tidak terlepas dari teori agensi yang mendasarinya. Teori agensi merupakan teori yang diperkenalkan pertama kali tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling dan menjelaskan mengenai hubungan yang terjalin antara prinsipal dan agen dalam suatu kontrak atau kesepakatan. Dalam hal ini, prinsipal yang dimaksud, yaitu pemilik dan pemegang saham, sedangkan agen yang dimaksud, yaitu manajer.

Dalam teori keagenan, prinsipal dan agen saling kerja sama dengan tujuan masing – masing dan melakukan pembagian tugas. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Teori agensi juga mengasumsikan bahwa, pada dasarnya, manusia merupakan makhluk individu sehingga lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan orang lain (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan asumsi tersebut, manajer cenderung akan bertindak bagi keuntungan dirinya sendiri yang seringkali bertentangan dan harus mengorbankan keinginan pemilik dan pemegang saham. Hal ini memicu terjadinya *agency problem*.

Permasalahan utama yang disebabkan karena hubungan keagenan, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (Bray & Kreps, 1991). *Moral hazard* adalah tindakan agen yang dapat mempengaruhi penilaian prinsipal terhadap tindakan tersebut. *Moral hazard* terjadi karena agen bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Di sisi lain, permasalahan karena hubungan keagenan muncul akibat kesenjangan informasi yang diperoleh pemilik dan pemegang saham dengan manajer sehingga terdapat informasi yang tidak seimbang diantara kedua belah pihak tersebut (Scott, 2015). Asimetri informasi inilah yang mengakibatkan terjadinya *adverse selection*. Asimetri informasi yang ada dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah oleh pemilik dan pemegang saham karena tidak memiliki informasi yang mencukupi.

Asimetri informasi tersebut mendorong dibentuknya Sarbanes – Oxley Act of 2002. Sarbanes Oxley Act of 2002 ditetapkan menjadi Undang – Undang pada tanggal 30 Juni 2002. Tujuan dibentuknya Sarbanes – Oxley Act of 2002 adalah untuk memulihkan kepercayaan investor, meningkatkan keandalan dan keakuratan pelaporan keuangan, meningkatkan isi dan ketepatan waktu persyaratan pengungkapan, memperkuat peranan direktur independen,

meningkatkan praktik dan prosedur pengendalian internal, serta meningkatkan sistem tata kelola perusahaan (Abdullah & Al-Jafari, 2011).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme untuk meminimalisir terjadinya *agency problem* pada perusahaan. Melalui adanya *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan masalah – masalah tersebut dapat diminimalisir melalui pengawasan menyeluruh terhadap tindakan manajer. *Good Corporate Governance* (GCG) juga menjadi jaminan bagi pemilik dan pemegang saham bahwa modal yang diinvestasikan dalam perusahaan telah dikelola oleh agen dengan tepat, benar, dan sesuai dengan fungsinya, serta diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan (Hamdani, 2016).

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Ciri khas dewan komisaris independen, yaitu netral dan bebas dari benturan kepentingan perusahaan (Rifai, 2009). Teori agensi menjelaskan bahwa dalam hubungan prinsipal dengan agen sering kali timbul benturan kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen mengakibatkan prinsipal tidak dapat memantau tindakan yang dilakukan oleh agen secara menyeluruh. Hal ini menciptakan keadaan yang disebut asimetri informasi. Asimetri informasi ini dapat menjadi celah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh agen. Selain menimbulkan asimetri informasi yang menjadi pemicu terjadinya *adverse selection*, hubungan keagenan juga menimbulkan masalah agensi lainnya, yaitu *moral hazard*. Dengan demikian, diperlukan unit pengawas yang dapat mengawasi tindakan yang dilakukan agen.

Dalam perusahaan, dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas untuk memonitoring tindakan yang dilakukan manajemen. Meskipun, dewan komisaris independen tidak turut serta dalam aktivitas operasional setiap hari, tetapi mereka tetap perlu menjalin ikatan kerja sama dengan direksi guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan (Siladi, 2006). Sebagai dewan komisaris yang netral, maka tidak ada tekanan yang diperoleh dari pihak internal perusahaan sehingga mereka dapat bertindak secara independen (Wicaksono & Chariri, 2015). Selain itu, keberadaan dewan komisaris independen merupakan perwujudan pilar perilaku beretika dalam pilar *corporate governance*. Berdasarkan pilar ini, perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* dengan berlandaskan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Hal ini sejalan dengan fungsi dewan komisaris independen yaitu untuk melindungi kepentingan pihak minoritas. Penelitian oleh Razali & Arshad (2014), Geraldes Alves (2011), Crutchley et al. (2007), serta Beasley (1996) mengungkapkan bahwa meningkatnya proporsi dewan komisaris independen berimbas pada menurunnya tingkat kecurangan yang terjadi karena pengawasan terhadap tindakan manajemen dapat dilakukan dengan semakin ketat seiring dengan meningkatnya proporsi dewan komisaris independen. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H_1 : Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Sifat dasar manusia sebagai makhluk hidup, yaitu cenderung memperhatikan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini akan memicu timbulnya benturan kepentingan diantara prinsipal dengan agen dan menyebabkan masalah agensi (*agency problem*), yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Adverse selection* timbul dari kesenjangan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen (asimetri informasi). Komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengatasi masalah agensi tersebut. Komite audit diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan perbedaan informasi antara prinsipal dan agen. Komite audit merupakan perwujudan pilar transparansi dalam pilar *corporate governance* sehingga dengan adanya komite audit dapat tercipta tata kelola yang transparan.

Menurut peraturan Kep.29/PM/2004, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bapepam (2004), menyatakan bahwa komite audit berjumlah minimal 3 (tiga) orang, dikepalai seorang dewan komisaris independen beserta 2 (dua) orang pihak eksternal

perusahaan dan berkeahlian khusus dalam bidang keuangan atau akuntansi. Bapepam juga mensyaratkan agar komite audit mengadakan rapat minimal sekali dalam periode triwulan. Rapat diadakan sebagai sarana komunikasi bagi anggota komite audit agar dapat melakukan tugasnya dengan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makin sering komite audit mengadakan rapat, maka makin ketat pengawasan terhadap manajer. Owens-Jackson et al. (2009) dalam penelitiannya membuktikan aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Abbott et al. (2000) juga menyatakan bahwa komite audit berbanding terbalik dengan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H₂ : Aktivitas Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Teori agensi mengungkapkan bahwa tujuan yang berlawanan diantara prinsipal dengan agen akan mengakibatkan timbulnya konflik dan masalah agensi. Masalah agensi yang ditimbulkan dari hubungan keagenan, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Adverse selection* disebabkan oleh adanya kesenjangan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen. Prinsipal dapat mengambil keputusan yang salah karena tidak memiliki informasi yang mencukupi. Oleh sebab itu, mekanisme pengawasan diperlukan untuk melindungi kepentingan prinsipal. Namun, mekanisme pengawasan menciptakan biaya tambahan yang dikenal sebagai *agency cost*. Besarnya biaya tersebut dapat dikurangi dengan penentuan struktur kepemilikan yang optimal (Haruman, 2005) .

Salah satu sistem pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah kecurangan laporan keuangan, yaitu melalui kepemilikan manajerial yang diukur dari persentase lembar saham manajemen perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan memberikan dorongan pada manajemen agar membuat keputusan yang menguntungkan prinsipal karena manajer juga merupakan bagian dari pemegang saham. Kepemilikan manajerial ini sesuai dengan pilar akuntabilitas dalam pilar *corporate governance* karena kepemilikan manajerial diadakan untuk mendorong manajer agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan sesuai kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*. Penelitian Owens-Jackson et al. (2009) dan Beasley (1996) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H₃ : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pengukuran variabel dependen, yaitu kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan variabel *dummy*, artinya variabel diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu kode 1 (satu) bagi perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan (FSF) dan kode 0 (nol) bagi perusahaan yang tidak melakukan kecurangan laporan keuangan (*Non – FSF*) (Yang et al., 2017). Perusahaan diklasifikasikan dalam kode 1 (satu) apabila perusahaan tersebut tidak menaati Peraturan Bapepam VIII.G.7 (sekarang OJK) yang diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh sanksi berupa denda.

Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit, dan kepemilikan manajerial. Dewan komisaris independen diukur dengan melakukan pembagian terhadap total dari dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris (Wicaksono & Chariri, 2015). Aktivitas komite audit diukur menggunakan jumlah rapat yang diadakan komite audit saat tahun kecurangan (Wicaksono & Chariri, 2015). Kepemilikan manajerial diukur dengan membagi jumlah saham milik dewan komisaris dan direksi dengan seluruh saham yang diedarkan perusahaan (Mahesarani, 2015). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, berupa profitabilitas dan leverage. Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE) sedangkan leverage diukur dengan membagi total hutang dengan total aset (Yang et al., 2017).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini, yaitu perusahaan – perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2020. Pemilihan sampel didasarkan melalui *purposive sampling*, artinya sampel diseleksi sesuai kriteria yang ditetapkan. Adapun pemilihan sampel didasarkan pada :

1. Sampel merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2020 dimana tidak termasuk perusahaan industri keuangan karena adanya perbedaan regulasi penyajian laporan keuangan pada industri keuangan dan non keuangan sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI).
2. Perusahaan yang termasuk dalam kode 1 (FSF) merupakan perusahaan yang melanggar Peraturan Bapepam (sekarang OJK) VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
3. Perusahaan yang termasuk dalam kode 0 (Non - FSF) merupakan perusahaan yang dijadikan kontrol dan pembanding dari perusahaan dengan kode 1 (FSF). Sampel dipilih berpasangan antara perusahaan dengan kode 0 (Non – FSF) dan kode 1 (FSF) berdasar kriteria perusahaan tersebut berada dalam sektor industri yang sama dengan total aset yang hampir sama.
4. Perusahaan mengungkapkan karakteristik rapat komite audit saat terjadinya kecurangan dan menyajikan data dalam annual report terkait dewan komisaris independen dan komposisi saham milik direksi dan dewan komisaris.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis. Regresi logistik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FSF = \alpha + \beta_1 \text{COMINDEP} + \beta_2 \text{ACMEET} + \beta_3 \text{OSHIP} + \beta \text{SIZE} + \beta \text{ROE} + \beta \text{LEV} + \epsilon$$

Keterangan :

FSF	: Kecurangan laporan keuangan (<i>dummy variable</i>) Kode 1 = melakukan kecurangan laporan keuangan Kode 0 = tidak melakukan kecurangan laporan keuangan
α	: <i>Alfa</i> atau Konstanta
β	: <i>Beta</i> atau Koefisien Variabel
COMINDEP	: Proporsi Dewan Komisaris Independen
ACMEET	: Aktivitas Komite Audit
OSHIP	: Kepemilikan Manajerial
ROE	: <i>Return on Equity</i>
LEV	: <i>Leverage</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel

Berdasarkan hasil proses pengumpulan sampel yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 25 perusahaan yang dikategorikan melakukan kecurangan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Kemudian, sampel dibuat berpasangan dengan perusahaan dengan kategori tidak melakukan kecurangan laporan keuangan yang ditentukan dari sektor industri dan total aset yang mendekati. Oleh karena itu, hasil akhir menunjukkan terdapat 50 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari 25 perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan dan 25 perusahaan yang tidak melakukan kecurangan laporan keuangan. Adapun proses seleksi sampel penelitian ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 1
Proses Seleksi Sampel Penelitian

Daftar perusahaan terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan berdasarkan data yang dikirimkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	55
Perusahaan di delisting dan dinyatakan pailit	(15)
Perusahaan Keuangan (<i>Financial Firm</i>)	(2)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap	(13)
Total perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan (FSF)	25
Total perusahaan tidak melakukan kecurangan laporan keuangan (<i>Non – FSF</i>)	25
Jumlah Sampel	50

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, jumlah sampel, yaitu 50 perusahaan. Sampel tersebut kemudian dirinci menurut tahun dan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Sampel menurut Tahun

Tahun	Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan	Tidak Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan
2009	1	1
2010	1	1
2011	3	3
2012	3	3
2013	4	4
2014	4	4
2015	4	4
2016	2	2
2017	0	0
2018	0	0
2019	2	2
2020	1	1
Total	25	25

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Selain perincian menurut tahun, sampel juga dirinci menurut sektor industrinya dan dijelaskan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3
Klasifikasi Sampel menurut Sektor Industri

Sektor	Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan	Tidak Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan
Energi (<i>Energy</i>)	5	5
Bahan Baku (<i>Basic Material</i>)	4	4
Perindustrian (<i>Industrial</i>)	2	2
Barang Konsumen Primer (<i>Consumer – Non Cyclical</i>)	2	2
Barang Konsumen Non-Primer (<i>Consumer Cyclical</i>)	3	3
Kesehatan (<i>Healthcare</i>)	1	1
Properti dan Real Estat (<i>Properties and Real Estate</i>)	6	6
Teknologi (<i>Technology</i>)	1	1
Infrastruktur (<i>Infrastructure</i>)	0	0
Transportasi dan Logistik (<i>Transportation and Logistic</i>)	1	1
Total	25	25

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan unruk menggambarkan dan melakukan analisis data melalui perhitungan sehingga mampu memperjelas keadaan dan spesifikasi data penelitian. Tabel 4 di bawah ini menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif pada 50 sampel yang diobservasi.

Tabel 4
Analisis Statistik Deskriptif Perusahaan FSF dan Non – FSF

Variabel	FSF					Non - FSF				
	N	Min	Max	Mean	St.Dev	N	Min	Max	Mean	St.Dev
COMINDEP	25	0,2500	0,6667	0,4173	0,1265	25	0,3333	1,0000	0,4983	0,1721
ACMEET	25	2	28	7,2400	5,6000	25	1	52	8,6000	10,5040
OSHIP	25	0	0,7580	0,0785	0,1848	25	0	0,6126	0,0285	0,1228

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Variabel independen pertama, yaitu proporsi dewan komisaris independen (COMINDEP). *Mean* proporsi dewan komisaris independen perusahaan yang melakukan kecurangan sebesar 0,4173 dan lebih rendah dibandingkan *mean* perusahaan yang tidak melakukan kecurangan sebesar 0,4983. Namun, *mean* proporsi dewan komisaris independen, baik perusahaan dikategorikan melakukan kecurangan maupun tidak telah menaati aturan proporsi dewan komisaris independen yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu minimal sebesar 30%. Variabel independen yang kedua, yaitu aktivitas komite audit (ACMEET). *Mean* aktivitas komite audit perusahaan yang

melakukan kecurangan, yaitu 7,2400 sedangkan yang tidak melakukan kecurangan, yaitu 8,6000. Hal ini menunjukkan perusahaan yang tidak terlibat kecurangan umumnya melakukan rapat komite audit lebih sering dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Bapepam mensyaratkan agar komite audit mengadakan rapat berkala minimal sebanyak sekali tiap triwulan. Dengan memperhatikan nilai mean aktivitas komite audit, baik perusahaan yang melakukan kecurangan maupun tidak, yaitu sebesar 7,2400 dan 8,6000, maka dapat dikatakan perusahaan – perusahaan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Variabel independen ketiga, yaitu kepemilikan manajerial (OSHIP). *Mean* perusahaan yang melakukan kecurangan adalah 0,0785 yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan dengan *mean* kepemilikan manajerial 0,0285. Maka dapat disimpulkan, perusahaan yang melakukan kecurangan cenderung memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi.

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas, yaitu menilai ada atau tidaknya korelasi pada variabel *predictor* dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF. *Tolerance* menginformasikan seberapa besar beta dipengaruhi variabel *predictor* lainnya sementara VIF menginformasikan sejauh mana korelasi antara variabel *predictor*.

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF
COMINDEP	0,991	1,009
ACMEET	0,999	1,001
OSHIP	0,991	1,009

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan VIF dibawah 10,000 yang menandakan bahwa diantara ketiga variabel independen tidak ditemukan indikasi adanya multikolinearitas.

Omnibus Test (Overall Test)

Omnibus test (overall test) dilakukan untuk menentukan ketepatan model penelitian dengan menyandingkan $-2 \text{ Log Likelihood}$ tahap awal dengan $-2 \text{ Log Likelihood}$ pada tahap akhir. Jika terjadi penurunan nilai, maka model dalam penelitian dikatakan sudah tepat. Hasil pengujian ini tercantum dalam tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Omnibus Test

Iteration	$-2 \text{ Log Likelihood}$
$-2 \text{ Log Likelihood}$ pada tahap awal	69.315
$-2 \text{ Log Likelihood}$ pada tahap akhir	61.747

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$. Oleh karena itu, model dalam penelitian ini dinyatakan sudah tepat.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Pengujian ini menilai cocok atau tidaknya model penelitian dengan data empirisnya melalui penggunaan nilai statistik *chi - square*. Jika nilai statistik *chi - square* lebih besar dari 0,05, maka model dikatakan cocok dan dapat diterima. Hasil pengujian ini tercantum dalam tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7
Uji Kelayakan Model

Step	Chi - square	Df	Signifikansi
1	12.072	8	0,148

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Tabel di atas menunjukkan *Chi – square* bernilai 12.072, *df* bernilai 8, dan signifikansi bernilai 0,148 (lebih dari 0,05). Oleh karena itu, model dianggap cocok dan dapat diterima.

Koefisien Determinasi (*Cox and Snell’s Square dan Nagelkerke’s R Square*)

Pengujian ini digunakan untuk menilai kemampuan yang diakibatkan variabel independen (*predictor*) terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Step	- 2 Log Likelihood	Cox and Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	61.747	0,140	0,187

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Cox and Snell R Square* bernilai 0,140 dan *Nagelkerke R Square* bernilai 0,187. Berdasarkan nilai tersebut, diartikan bahwa kemampuan proporsi dewan komisaris independen (COMINDEP), aktivitas komite audit (ACMEET), dan kepemilikan manajerial (OSHIP) sebagai variabel independen, serta profitabilitas (ROE) dan *leverage (LEV)* sebagai variabel kontrol dalam mempengaruhi kecurangan laporan keuangan (FSF) sebagai variabel dependen adalah sebesar 18,7%. Sementara, 81,3% lainnya disebabkan oleh faktor lainnya di luar model.

Matriks Klasifikasi

Pengujian matriks klasifikasi ini dilakukan untuk memperjelas gambaran terkait tepat atau tidaknya model regresi logistik dengan menggunakan data observasi. Hasil matriks klasifikasi pada penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9
Matriks Klasifikasi

Observed		Predicted		Percentage Correct	
		FSF			
		Tidak Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan	Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan		
Step 1	FSF	Tidak Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan	15	10	60,0
		Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan	9	16	64,0
Overall Percentage				62,0	

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 sampel perusahaan yang tidak melakukan kecurangan laporan keuangan terdapat 15 perusahaan yang memang tidak melakukan kecurangan dan 10 perusahaan yang seharusnya tidak melakukan kecurangan laporan keuangan, tetapi melakukannya. Sementara, 25 sampel perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan terdapat 9 perusahaan yang diperkirakan melakukan kecurangan laporan keuangan, tetapi tidak melakukannya dan 16 perusahaan yang memang melakukan kecurangan laporan keuangan. Tabel tersebut juga menggambarkan nilai ketepatan model penelitian yang ditunjukkan oleh nilai persentase keseluruhan, yaitu sebesar 62%.

Uji Hipotesis (Regresi Logistik)

Regresi logistik sebagai metode pengujian terhadap hipotesis. Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 5%, artinya hipotesis diterima jika nilai signifikansinya kurang dari 5%. Tabel 6 menunjukkan hasil regresi logistik pada penelitian ini.

Tabel 10
Regresi Logistik

	Variabel	B	SE	Wald	Df	Sig	Exp (B)
Step 1 ^a	COMINDEP*	-5.040	2.397	4.421	1	0,035	0,006
	ACMEET	-0,023	0,038	0,335	1	0,552	0,978
	OSHIP	4.137	2.872	2.075	1	0,150	62.641
	ROE	0,002	0,003	0,866	1	0,352	1.002
	LEV	0,722	0,976	0,547	1	0,460	2.058
	Constant	2.025	1.149	3.107	1	0,078	7.579

*Signifikan (<5%)

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2022

Hasil pengujian regresi logistik mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) **diterima**. Hal ini karena keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan sebagai unit pengawas yang bertugas mengawasi kinerja manajer. Dewan komisaris independen tidak memperoleh tekanan dari pihak internal perusahaan sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan netral dan objektif. Seiring dengan peningkatan anggota yang independen dengan proporsi yang seimbang dengan dewan komisaris internal, akan meningkatkan fungsi pengawasan sehingga dapat lebih ketat. Dengan pengawasan yang ketat tersebut akan mendorong manajer berhati – hati dalam tindakannya dan meminimalisir kecurangan terhadap laporan keuangan. Hasil pada penelitian ini konsisten dengan penelitian Razali & Arshad (2014), Geraldes Alves (2011), Crutchley et al. (2007), dan Beasley (1996) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara proporsi dewan komisaris independen dan kecurangan laporan keuangan.

Hasil pengujian regresi logistik tersebut mengenai pengaruh aktivitas komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,552. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) **ditolak**. Hal ini karena ketika rapat, belum tentu komite audit dapat menghasilkan keputusan yang mampu meminimalisir kecurangan pada laporan keuangan sehingga rapat yang sering pun tidak menjadikan perusahaan akan bebas

dari kecurangan. Dalam rapat komite audit, hasil temuan pada rapat memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari dewan komisaris perusahaan sehingga jika dewan komisaris tidak menindaklanjuti hasil temuan tersebut, maka hasil temuan rapat tidak dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, aktivitas komite audit seharusnya tidak dinilai berdasarkan jumlah rapat saja tetapi juga dari temuan yang berhasil ditindaklanjuti. Selain itu, kecurangan jenis ini bersifat sistematis sehingga sulit untuk diketahui dari rapat saja dan memerlukan audit operasional perusahaan. Rapat komite audit juga pada umumnya tidak melibatkan pihak manajemen dan direksi sehingga sulit bagi komite audit mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Abbott et al. (2000) dan Owens-Jackson et al. (2009) yang membuktikan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara aktivitas komite audit dan kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prasetyo (2016) dan Nurisam & Ghaisani (2018) yang menyatakan bahwa aktivitas komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil pengujian regresi logistik mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,150. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) **ditolak**. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi perusahaan, bukan hanya kepemilikan manajerial saja. Kondisi perusahaan juga dipengaruhi oleh karyawan, pemegang saham lainnya, baik pemegang saham individu maupun institusional, dan sebagainya sehingga kepemilikan manajerial tidak memegang peranan yang besar. Selain itu, belum banyak perusahaan yang memberikan kompensasi berupa saham kepada manajemen sehingga sulit menjalankan upaya meminimalisir kecurangan laporan keuangan melalui kompensasi berbasis saham. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Beasley (1996) dan Owens-Jackson et al. (2009) yang membuktikan hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yang et al. (2017), Prasetyo (2016), serta Nurisam & Ghaisani (2018) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dan kecurangan laporan keuangan.

Selain itu, hasil pengujian regresi logistik juga menunjukkan bahwa kedua variabel kontrol, yaitu profitabilitas (ROE) dan *leverage* (LEV) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (FSF). Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,352 sedangkan *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,460.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara, aktivitas komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, kedua variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pengujian pada penelitian ini menunjukkan hasil variabel independen, berupa proporsi dewan komisaris independen (COMINDEP), aktivitas komite audit (ACMEET), kepemilikan manajerial (OSHIP) sebagai variabel independen, serta profitabilitas (ROE) dan *leverage* (LEV) sebagai variabel kontrol hanya menjelaskan kecurangan laporan keuangan sebesar 18,7% sedangkan 81,3% lainnya disebabkan oleh variabel lain di luar model. Selain itu, rendahnya sampel karena hanya mengandalkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan dan banyak perusahaan yang tidak mempunyai data yang diperlukan dalam annual reportnya.

Berdasarkan keterbatasan – keterbatasan di atas, maka saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui *Beneish Ratio* sehingga sampel yang akan diuji lebih banyak dan dapat memprediksi populasi dengan lebih tepat. Selain itu, Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menguji aktivitas komite audit dengan menggunakan variabel jumlah temuan komite audit yang diselesaikan dan ditindaklanjuti. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel tata kelola lainnya yang berkaitan dengan struktur kepemilikan, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan individual, dan sebagainya.

REFERENSI

- Abbott, L. J., Park, Y., & Parker, S. 2000. The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. *Managerial Finance*, 26(11). <https://doi.org/10.1108/03074350010766990>
- Abdullah, K. A., & Al-Jafari, M. K. 2011. The effect of Sarbanes-Oxley Act (SOX) on corporate value and performance. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 33, 42–55.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Kep-29/PM/2004. Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Baridwan, Z. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE.
- Barnhart, S. W., & Rosenstein, S. 1998. Board composition, managerial ownership, and firm performance: An empirical analysis. *Financial Review*, 33(4). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1998.tb01393.x>
- Beasley, M. S. 1996. An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *Accounting Review*, 71(4), 443–465. <https://doi.org/10.2469/dig.v27.n2.79>
- Bray, M., & Kreps, D. M. 1991. A Course in Microeconomic Theory. *The Economic Journal*, 101(406). <https://doi.org/10.2307/2233572>
- Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., & Rui, O. M. 2006. Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12(3), 424–448. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.002>
- Crutchley, C. E., Jensen, M. R. H., & Marshall, B. B. 2007. Climate for scandal: Corporate environments that contribute to accounting fraud. *Financial Review*, 42(1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2007.00161.x>
- Geraldes Alves, S. M. 2011. The effect of the board structure on earnings management: evidence from Portugal. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 9(2), 141–160. <https://doi.org/10.1108/19852511111173103>
- Hamdani, M. 2016. Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory. *Semnas Fekon 2016*, 279–283.
- Haruman, T. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Hidayanti, E., & Sunyoto. 2012. Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi. *Jurnal WIGA*, 2(2), 19–28.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2019.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mahesarani, Dwi Shinta 2015. "Pengaruh Tata Kelola perusahaan Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan".Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Nurisam, & Ghaisani, H. M. 2018. Pengaruh Tata Kelola perusahaan Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Ahmad Dahlan Accounting Fair*, 1–17.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Owens-Jackson, L. A., Robinson, D., & Waller Shelton, S. 2009. The Association Between Audit Committee Characteristics, the Contracting Process and Fraudulent Financial Reporting. *American Journal of Business*, 24(1), 57–66. <https://doi.org/10.1108/19355181200900005>
- Prasetyo, A. B. 2016. Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 1(2), 50. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2016.1.2.304>
- Razali, W. A. A. W. M., & Arshad, R. 2014. Disclosure of Corporate Governance Structure and the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 243–253. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.032>
- Rifai, B. 2009. Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 396–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>
- Scott, W. R. 2015. Financial Accounting Theory Seventh Edition. In *Financial Accounting*.
- Siladi, B. 2006. The role of non-executive directors in corporate governance: An evaluation. *Asia Pacific Business Review*, 2(2), 81–86.
- Sunaryo, K., Astuti, S., & Zuhrotun. 2019. *The role of risk management and good governance to detect fraud financial reporting*. 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art4>
- Tiapandewi, N. K. Y., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2020). Dampak Fraud Triangle Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 156–173.
- Uzun, H., Szewczyk, S. H., & Varma, R. 2004. Board composition and corporate fraud. *Financial Analysts Journal*, 60(3), 33–43. <https://doi.org/10.2469/faj.v60.n3.2619>
- Wicaksono, G. S., & Chariri, A. 2015. Mekanisme Corporate Governance Dan Kemungkinan Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 552–563.
- Yang, D., Jiao, H., & Buckland, R. 2017. Technological Forecasting & Social Change The determinants of financial fraud in Chinese firms: Does corporate governance as an institutional innovation matter? *Technological Forecasting & Social Change*, 125(December 2016), 309–320. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.035>